

**LAPORAN BULANAN PUSAT KERJA SAMA LUAR NEGERI
PERIODE MARET 2015
PUSAT KERJA SAMA LUAR NEGERI**

| No | Hari/Tanggal/ Tempat | Kegiatan | Pihak yang Terlibat | Hasil dan Keputusan | Tindak Lanjut |
|-------------------------------|---|--|--|---|--|
| I. KERJASAMA BILATERAL | | | | | |
| 1. | Tanggal 05-06 Maret 2015 di Pusat KLN | Tindak lanjut kegiatan <i>Pilot Project</i> pengembangan demplot kedelai di Madagaskar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Litbang Pertanian, 2. Balai penelitian tanaman aneka kacang dan umbi Malang 3. Badan Karantina Pertanian, 4. TU Pusat KLN 5. Bidang Bilateral Pusat KLN | <p>Dalam rangka tindak lanjut kegiatan <i>Pilot Project</i> pengembangan demplot kedelai di Madagaskar tahun anggaran 2014, kami telah melakukan kegiatan persiapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dokumen kesepakatan pelaksanaan kerjasama kegiatan evaluasi pengembangan demplot kedelai tahun 2015 antara Pusat KLN dengan tenaga ahli yang ditugaskan (TAKPRI). 2. Membuat kerangka acuan kerja/ TOR kegiatan evaluasi pengembangan demplot kedelai di Madagaskar melalui kerangka kerja sama bilateral tahun 2015 dan 3. Membuat SK KPA Pusat kerjasama Luar Negeri terhadap penetapan besarnya uang saku pengiriman tenaga ahli pertanian ke Madagaskar. <p>Pengiriman tenaga ahli direncanakan pada tanggal 21 Maret 2015, yaitu atas nama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prof Dr. Sudaryono (peneliti Utama pada Balitkabi Malang) yang ditugaskan dalam jangka waktu 4 bulan (Maret – Juni 2015) DIPA Balitbang melalui program SMARTD Project (IBRD Loan No. 8188-ID) 2. Dr. Heru Kuswantoro, MP (peneliti madya pada Balitkabi | Pengiriman tenaga ahli pada tanggal 21 Maret 2015 Setelah SP Setneg keluar |

| | | | | | |
|----|---|--|---|--|---|
| | | | | Malang) yang ditugaskan selama 3 bulan (Maret-Mei 2015) DIPA Pusat KLN. | |
| 2. | Tanggal 9 - 10 Maret 2015 Pusat KLN | Penyusunan Buku Bahan Kerja Sama Dengan Negara Mitra | Pusat KLN, PSEKP, Kementerian Luar Negeri, FEM IPB | <ol style="list-style-type: none"> 1. Draft awal sedang dalam proses pengeditan di Pusat KLN. 2. Pusat KLN telah menerima masukan dari Kementerian Luar Negeri mengenai beberapa perkembangan kerja sama dengan negara mitra. | Proses revisi dan update perkembangan kerja sama akan terus dilakukan. |
| 3. | Tanggal 3 Maret 2015. Ditjen. HKI, Kemenkumham | Pembahasan persiapan <i>Exploration Talks GI RI-UE (European Union)</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementan (Pusat KLN dan Dit. Mutu dan Standarisasi) 2. Kemenlu 3. Kementerian Sekretariat Negara 4. Kementerian Perindustrian Ditjen. HKI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan pembahasan <i>non-paper working arrangements</i> untuk pembentukan <i>stand-alone agreement on protection of GIS</i> sebagai payung kerja sama bidang GI antara Indonesia dengan EU. 2. Produk GI adalah produk yang memiliki kualitas terbaik (<i>premium quality</i>) dan spesifik pada wilayah tertentu. 3. Salah satu contoh adalah kopi yang banyak dihasilkan di beberapa wilayah di Indonesia dengan <i>trade mark</i>-nya telah banyak diambil oleh warga negara asing. Maka dari itu diperlukan perlindungan GI untuk produk-produk pertanian Indonesia. | <p>Pihak Indonesia masih mempelajari <i>draft non-paper working arrangements</i>.</p> <p>Selanjutnya pertemuan akan dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2015.</p> |
| 4. | Tanggal 5 Maret 2015. Kemenko Perekonomian | Persiapan Sidang Komisi Bersama (SKB) RI-Rusia di Kazan, Republik Tartstan, Federasi Rusia | Kementerian/Lemmbaga Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan tentang tentative agenda pertemuan SKB RI-Rusia ke-10 yang akan dilaksanakan pada tanggal 7-10 April di Kazan, Republic Tarstan, Federasi Rusia; 2. Persiapan masing-masing working group, yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - <i>WG on Legal Basis of the Bilateral Cooperation</i> - <i>WG on Trade, Investment and Industry</i> - <i>WG on Cultural and Tourist of Exchange</i> - <i>WG on Transaction and infrastructure</i> | PKLN akan membahas secara internal usulan dari Kemenlu tersebut. |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| | | | | <p>3. Isu Perjanjian Kerjasama masuk kedalam pembahasan <i>WG on Legal Basis of the Bilateral Cooperation</i> yang dikoordinir oleh Kementerian Luar Negeri cq. Ditjen. Amerop.</p> <p>4. Perjanjian Kerja Sama bidang pertanian antara RI-Rusia terdapat 2 perjanjian kerja sama yaitu <i>draft MOU on Agriculture</i> antara Kementan RI dan Kementan Rusia serta <i>Agreement</i> bidang penelitian antara Badan Litbang, Kementan dan RASS (<i>Russian Academy of Agricultural Science</i>). Kedua perjanjian kerja sama tersebut telah siap untuk ditandatangani, akan tetapi Kementan menginginkan agar MOU on Agriculture terlebih dahulu ditandatangani, kemudian agreement dapat ditandatangani.</p> <p>Masukan dari Ditjen. Amerop, Kemenlu adalah bahwa Agreement tersebut telah dapat ditandatangani tanpa harus menunggu MOU ditandatangani terlebih dahulu. Sepanjang isi dari Agreement tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak.</p> | |
| 5. | Tanggal 6 Maret 2015., diKemenkumham | Pertemuan exploratory talks | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementan (Pusat KLN dan Dit. Mutu dan Standarisasi). 2. Kemenlu. 3. Kementerian Sekretariat Negara. 4. Kementerian Perindustrian. <p>Ditjen. HKI</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan ini adalah lanjutan dari <i>video conference GI Talks ke-2</i> yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2015 di Kemelu. 2. Pertemuan tersebut membahas pada kriteria-kriteria produk yang masuk kategori GI dan <i>list</i> dari produk GI dari masing-masing pihak. 3. Persepsi kedua belah pihak harus disamakan terlebih dahulu. | Akan diadakan pembahasan tindaklanjut. |

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|
| 6. | Tanggal 6 Maret 2015, Kementerian Luar Negeri | Rapat Persiapan Kunjungan Presiden RI ke Jepang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemenko Bidang Perekonomian 2. Kemenko Bidang Kemaritiman 3. Kementerian Pertahanan 4. Kementerian Keuangan 5. Kepolisian RI 6. BKPM 7. Kementerian Pertanian 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan 9. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 10. KADIN Jepang | <p>Hasil Pembahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden RI direncanakan akan melakukan kunjungan ke Jepang pada tanggal 22 Maret 2015. Beberapa hal yang akan dibahas yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>General Review</i> Indonesia-Jepang <i>Economic Partnership Agreement</i> (IJ-EPA) b. Review Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Jepang c. Rencana Pembentukan Forum 2+2 d. Rencana Pembentukan Forum Kerjasama Maritim e. Rencana Penandatanganan MoU <i>on Defense Cooperation</i> dan MoU <i>on Police Cooperation</i>. 2. Pada bulan April 2014, Pemri telah menyampaikan TOR <i>General Review</i> Jepang menekankan pentingnya isu konsesi tarif produk otomotif menjadi prioritas utama. 3. Terkait dengan kerja sama pertanian, telah ditandatangani <i>Record of Discussion (RoD)</i> bidang pertanian pada tanggal 14 April 2014, di Tokyo. 4. Direncanakan pada minggu kedua bulan Mei 2015 akan dilaksanakan <i>Senior Official Meeting</i> (SOM) RI-Jepang ke-1 di Jakarta. 5. Pemri berkeinginan mengeksport buah honey melon yang berasal dari daerah Sembalon-Lombok, NTB ke Jepang. Pemerintah Indonesia sudah mengirimkan surat permohonan kepada Jepang untuk mendapatkan akses pasar buah melon dilengkapi dengan <i>Technical Information</i>. Namun Pemerintah Jepang masih khawatir dengan adanya lalat buah yang ada di Indonesia. Pihak Jepang mensyaratkan <i>treatment</i> lalat buah dengan menggunakan <i>Vapour Heat Treatment (VHT)</i>. Tetapi bantuan yang diberikan oleh Jepang untuk Indonesia dalam kerangka IJ EPA ini masih skala <i>research</i>, Pihak Indonesia meminta agar VHT tersebut dapat dikembangkan untuk skala | Berkoordinasi dengan instansi terkait. |
|----|---|---|--|--|--|

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|--|
| | | | | <p>komersial dan menawarkan perlakuan <i>Hot Water Treatment (HWT)</i> untuk buah tersebut.</p> <p>6. Dalam kerangka IJ EPA, saat ini terdapat kegiatan <i>Public Private Partnership Project for Improvement of Agriculture Product Distribution System</i>. <i>Project</i> ini bertujuan untuk memberikan akses pasar kepada <i>Sub Terminal Agribusiness (STA)</i> di beberapa wilayah di Indonesia sehingga STA tersebut dapat memasok dan memasarkan produknya secara langsung kepada jaringan supermarket, minimarket, restoran termasuk perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Lokasi STA tersebut terdiri dari 4 daerah yaitu Bogor, Cianjur, Sukabumi, dan Garut dimana lokasi STA tersebut relatif dekat dengan pusat distribusi yang telah ada.</p> <p>7. Kajian terhadap proyek ini telah selesai dilaksanakan dan telah ditandatangani MoU antara Kementerian Pertanian, JICA, dan Dinas Jawa Barat. Direncanakan pada bulan Juni 2015 akan dilaksanakan pelatihan untuk para pelaku usaha yang akan dilaksanakan di Sukabumi. Sedangkan pembangunan STA tersebut direncanakan tahun 2015.</p> | |
| 7. | Tanggal 18 Maret 2015, Kampus Kementerian Pertanian, Jakarta | Penandatanganan MOU bidang pertanian RI-Kuba | Kedutaan Besar Kuba di Jakarta, Kementerian Luar Negeri, Ditjen PPHP, Badan Litbang Pertanian, Badan Karantina Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Pusat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan MOU bidang pertanian RI-Kuba dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI dan Duta Besar Kuba di Jakarta, H.E Enna Viant Valdes. 2. Bentuk-bentuk kegiatan kerjasama di bawah MOU ini mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a) Pertukaran informasi dan dokumen ilmiah dan teknis; b) Transfer teknologi, termasuk pelatihan, seminar dan lokakarya; c) Promosi produksi pertanian dan pemasaran komoditi | Pusat KLN Kementerian Pertanian akan berkoordinasi dengan eselon I terkait untuk implementasi MOU bidang pertanian RI-Kuba |

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|
| | | | KLN, Biro Umum dan Humas, Biro Hukum dan Informasi Publik | <p>pertanian antara pihak swasta kedua negara;</p> <p>d) Penelitian bersama;</p> <p>e) Bentuk kerjasama lain yang disepakati oleh Para Pihak.</p> <p>3. Kedua belah pihak setuju bahwa penandatanganan MOU tersebut merupakan titik awal untuk kerjasama bidang pertanian yang lebih konkret kedepannya.</p> | |
| 8. | Tanggal 19 Maret 2015, Kementerian Luar Negeri, Jakarta | Rapat dalam rangka Pertemuan Bilateral di sela-sela KAA, 19-24 April 2015 | Kementerian Luar Negeri, Kemenko bidang Polhukam, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kemendikbud, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemenpora, Badan Intelijen Negara, Kadin, PPATK dan instansi terkait lainnya. | <p>1. Konferensi Asia-Afrika (KAA) akan dilaksanakan pada tanggal 19-24 April 2015 di Jakarta dan Bandung untuk memperingati 60 tahun KAA tahun 1955 dan 10 tahun <i>New Asian-African Strategic Partnership</i> (NAASP). Dalam kaitan tersebut Presiden RI telah mengundang 109 kepala negara/pemerintah dari kawasan Asia dan Afrika. Presiden RI juga mengundang 17 negara dan 17 organisasi regional/internasional selaku peninjau (observer) antara lain Argentina, Brazil, Chile, Kuba, Trinidad and Tobago, serta Venezuela. Di sela-sela pelaksanaan konferensi tersebut akan dilaksanakan pertemuan bilateral dengan negara-negara peninjau (observer) tersebut.</p> <p>2. Hal-hal pokok terkait bidang pertanian yaitu :</p> <p>a. Argentina :</p> <p>Isu terkait sektor pertanian yaitu tindak lanjut MOU bidang pertanian yang telah ditandatangani pada tanggal 17 Januari 2013 dan pelaksanaan <i>Working Group on Agriculture Cooperation</i> (WGAC) RI-Argentina yang ke-1. WGAC RI-Argentina ke-1 direncanakan dilaksanakan pada bulan November 2013, namun ditunda pelaksanaannya, karena</p> | Rencana pertemuan bilateral Menteri Pertanian Afrika Selatan dan Menteri Pertanian, perikanan, Kehutanan, Perikanan dan Biosecurity Vanuatu dengan Menteri pertanian RI di sela-sela KAA. |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>dipandang posisi Indonesia pada waktu itu tidak begitu kuat dan hanya akan menguntungkan pihak Argentina, mengingat Argentina ingin memasukkan dagingnya ke Indonesia. Terkait hal ini, Kementerian Pertanian mengusulkan agar isu terkait pertemuan WGAC sebaiknya tidak dibahas dalam pertemuan bilateral nantinya.</p> <p>Sebagai tindak lanjut penandatanganan MOU bidang pertanian RI-Argentina, usulan kerjasama yang mungkin dapat dilaksanakan adalah mengenai penelitian dan pengembangan bidang pertanian, namun hal ini harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan eselon teknis terkait di Kementerian Pertanian.</p> <p>b. Kuba :</p> <p>Isu terkait sektor pertanian yaitu tindak lanjut penandatanganan MOU bidang pertanian pada tanggal 18 Maret 2015. Sebagai tindak lanjut penandatanganan MOU ini, disampaikan bahwa kerjasama yang akan dilakukan adalah penelitian dan pengembangan di bidang gula.</p> <p>c. Chile</p> <p>Isu terkait sektor pertanian yaitu adanya keinginan Chile untuk mengeksport daging sapi dan daging ayam ke Indonesia. Terkait hal ini disampaikan bahwa importasi daging sapi hanya bisa dilakukan dari negara yang bebas penyakit PMK secara menyeluruh (<i>country base status</i>). Sedangkan terkait importasi daging ayam, Indonesia saat ini sudah swasembada daging ayam dan juga dibutuhkan persyaratan kehalalan untuk importasinya. Isu lainnya yaitu terkait</p> | |
|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|---|
| | | | | <p>penyampaian dokumen kesehatan buah-buahan di Chile sebagai negara yang bebas dari lalat buah (<i>fruit flies</i>).</p> <p>3. Pihak Kementerian Luar Negeri mengharapkan masing-masing Kementerian dan Lembaga dapat menyampaikan usulan kerjasama konkret yang akan dimasukkan sebagai bahan ketua delegasi Indonesia pada pertemuan bilateral dengan negara-negara observer dimaksud.</p> | |
| 9. | Tanggal 19 Maret 2015 di Kantor Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kemenlu | Peluncuran buku "hubungan Indonesia-Afrika:perspektif Ekonomi-Politik" | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat 2. Dubes Sudan 3. Dubes Zimbabwe 4. Dubes Maroko 5. Dubes Afrika Selatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku "hubungan Indonesia-Afrika:perspektif Ekonomi-Politik" tersebut dikeluarkan oleh Badan pengkajian dan pengembangan kebijakan (BPPK) Kementerian Luar negeri bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Al-Azhar Indonesia, <i>Center for Southeast Asian Studies</i> Indonesia dan Persatuan Jurnalis Muslim Indonesia 2. Kegiatan peluncuran buku tersebut merupakan kelanjutan dari rangkaian kegiatan "<i>Ramadhan Dialogue Series</i>" yang melibatkan empat kedutaan besar Negara Afrika di Jakarta yaitu Kedutaan Besar Maroko, Nigeria, Sudan dan Zimbabwe 3. Kegiatan ini diawali dengan presentase oleh Kepala BPPK Mohamad heri Sarifudin perihal kebijakan luar negeri Indonesia terhadap kerjasama dengan Negara-negara Afrika. Kemudian dilanjutkan dengan presentase dari Dubes Zimbabwe Alice Mageza perihal hubungan Indonesia Afrika dari sudut pandang Politik dan Dubes Afrika Selatan PA Sifuba perihal hubungan Indonesia-Afrika dari sudut pandang ekonomi. 4. Acara ini juga dihadiri oleh Dubes Sudan, Zimbabwe dan Maroko 5. Hubungan Indonesia dengan Afrika secara statistik ada kecenderungan naik setiap tahun. Namun demikian | - akan diagendakan dialog dengan tema " <i>Indonesia-Afrika the Series</i> " dan disiarkan melalui media cetak maupun elektronik. |

| | | | | | |
|-----|---|---|--|---|--|
| | | | | <p>Indonesia masih kalah aktif jika dibandingkan dengan Negara-negara Asia lainnya seperti China dan Malaysia.</p> <p>6. Untuk meningkatkan hubungan kerjasama Indonesia-Afrika, Indonesia dapat memanfaatkan forum kerjasama bilateral seperti KSST, forum regional seperti IORA maupun Multilateral seperti OIC dan NAM.</p> | |
| 10. | Tanggal 19 Maret 2015 di Kantor Badan Litbang Pertanian | Sosialisasi hasil kerjasama selatan-selatan tentang proyek pengembangan padi di Sudan dan kedelai di Madagaskar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil dari seluruh eselon I Kementerian Pertanian 2. Fakultas Pertanian IPB 3. Fakultas Pertanian UNAS Jakarta 4. Dinas Pertanian Jakarta 5. Dinas Pertanian Jawa Barat 6. Dinas Pertanian Banten 7. Redaksi Tabloid Sinar Tani 8. Redaksi Tabloid Agrina 9. Redaksi Tabloid Majalah Swadaya 10. Redaksi Republika | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan ini dalam rangka penyebarluasan hasil inovasi Badan Litbang Pertanian terutama hasil pengembangan demplot padi di Sudan dan kedelai di Madagaskar. 2. Paparan disampaikan oleh tenaga ahli padi Prof. Abdul Karim Makarim dan tenaga ahli Kedelai Prof. Sudaryono 3. Dari hasil paparan disampaikan bahwa uji varietas Indonesia telah berhasil dan bahkan lebih baik dari varietas local. Dari sisi produksi varietas Indonesia 2 kali lebih banyak dari varietas lokal 4. Pada tahun 2015 ini Kementan kembali mengirimkan 2 orang tenaga ahli kedelai ke Madagaskar untuk melanjutkan proyek pengembangan demplot kedelai 5. Namun karena terbatasnya anggaran pada tahun 2015 tidak mengirim tenaga ahli ke Sudan, hal ini sangat disayangkan mengingat Pemerintah Sudan hanya akan mengakui hasil uji varietas Indonesia jika dilaksanakan selama dua tahun. | Pusat KLN akan berkoordinasi dengan penentu kebijakan terkait keberlanjutan proyek pengembangan padi di Sudan. |

| | | | | | |
|-----|--|--|-------------------------------|---|---|
| | | | 11. Redaksi Sains Indonesia | | |
| 11. | Tanggal 21-27 Maret 2015 | Pengiriman tenaga Ahli | Badan Litbang Pertanian, | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka menindak lanjuti proyek pengembangan demplot kedelai di madagaskar tahun 2014, maka Kementerian Pertanian pada tahun 2015 ini mengirimkan dua orang tenaga ahli kedelai dari Badan Litbang Pertanian. 2. Dua orang tenaga ahli dimaksud yaitu : Prof. Dr. Sudaryono yang ditugaskan selama 4 bulan (21 Maret-21 Juli 2015) dan dr. Heru Kuswanto, MP yang ditugaskan selama 3 bulan (21 Maret-21 Juni 2015). 3. Kedua tenaga ahli kedelai tersebut berasal dari Balai besar aneka kacang dan umbi Malang. 4. Pada penugasan tahun 2015 ini, program utama yang akan dilakukan adalah Uji teknologi kedelai varietas Indonesia dan varietas local pada lahan kering serta workshop dan pelatihan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan temu lapang yang akan dilaksanakan pada minggu ke-2 April 2015 2. Pelaksanaan workshop "Pengembangan Kedelai di Madagaskar pada minggu ke-3 April 2015. |
| 12. | Tanggal 23 Maret 2015 , di Kementerian Luar Negeri | Menghadiri rapat pembahasan tindak lanjut hasil kunjungan kerja Menlu RI ke PNG, Kepulauan | Kementerian Lembaga terkait / | <p>Menteri Luar Negeri telah melakukan kunjungan kerja ke PNG, Kepulauan Salomon dan Fiji pada tanggal 27 Februari – 1 Maret 2015.</p> <p>Hal-hal yang terkait dengan bidang pertanian antara lain adalah komitmen Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pertanian untuk memberikan 25 unit alsintan ke Vanuatu, 10 unit alsintan ke Fiji serta 2 paket pelatihan untuk negara anggota MSG. Kementan berupaya untuk mengakomodir usulan Kemlu untuk mengalokasikan ulang Alsintan tersebut untuk negara PND dan Kepulaun Salomon</p> <p>Pusat KLN menyampaikan bahwa bantuan dimaksud telah</p> | Pusat KLN akan berkoordinasi dengan Ditjen PSP dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|
| | | | | dilimpahkan ke Ditjen teknis yaitu Ditjen PSP dan Badan Pnnyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Kemlu mengharapkan untuk mengaktifkan MoU kerja sama bidang pertanian dengan Fiji melalui pembentukan JAWG. | |
| II. KERJASAMA REGIONAL | | | | | |
| 1. | Tanggal 2 Maret 2015, Pusat KLN | Rapat Panitia Workshop Dukungan Swasembada Pangan Melalui Forum Internasional KESR dan D8 | 1. Pusat KLN 2. Biro Umum dan Humas 3. Ditjen PPHP | Perkembangan masing-masing bidang dalam kepanitiaan terkait persiapan Workshop. | 1. Updating narasumber, moderator, dan peserta 2. Persiapan logistik |
| 2. | Tanggal 2 Maret 2015/ Sesditjen. Hortikultura | Rapat persiapan sidang ASWGC ke-22 | 1. Ditjen. Hortikultura 2. Badan Karantina Pertanian 3. Pusat KLN | 1. Rapat ini ditujukan untuk membahas persiapan pelaksanaan sidang ASWGC ke-22. 2. Indonesia akan menjadi <i>host dan Chairman</i> pada pertemuan ASWGC ke-22, yang rencananya akan dilaksanakan secara <i>back-to-back</i> dengan pertemuan <i>Expert Working Group on Sanitary Phytosanitary (EWG-PS)</i> pada bulan Mei 2015, di Yogyakarta. 3. selain pertemuan EWG-PS dan ASWGC juga akan dilaksanakan agenda tambahan yaitu " <i>Brainstorming on Development of new SPA for ASWGC (2016-2025)</i> ", yang diajukan oleh <i>ASEAN Secretariat (ASEC)</i> , yang | 1. Diharapkan adanya peran Pusat KLN dan Badan Karantina Pertanian sebagai <i>host</i> dalam penyelenggaraan <i>welcome dinner</i> , 2. Ditjen. Hortikultura akan kembali mengundang eselon teknis terkait untuk |

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|
| | | | | rencananya akan dilaksanakan di hari ke-3. | pembahasan <i>provisional agenda</i> sidang ASWGC. |
| 3. | Tanggal 2 Maret 2015, Sesditjen. Hortikultura | Rapat persiapan sidang ASWGC ke-22 | 1. Ditjen. Hortikultura 2. Badan Karantina Pertanian 3. Pusat KLN | 1. Rapat ini ditujukan untuk membahas persiapan pelaksanaan sidang ASWGC ke-22. 2. Indonesia akan menjadi <i>host dan Chairman</i> pada pertemuan ASWGC ke-22, yang rencananya akan dilaksanakan secara <i>back-to-back</i> dengan pertemuan <i>Expert Working Group on Sanitary Phytosanitary (EWG-PS)</i> pada bulan Mei 2015, di Yogyakarta. 3. selain pertemuan EWG-PS dan ASWGC juga akan dilaksanakan agenda tambahan yaitu " <i>Brainstorming on Development of new SPA for ASWGC (2016-2025)</i> ", yang diajukan oleh ASEAN <i>Secretariat (ASEC)</i> , yang rencananya akan dilaksanakan di hari ke-3. | 1. Diharapkan adanya peran Pusat KLN dan Badan Karantina Pertanian sebagai <i>host</i> dalam penyelenggaraan <i>welcome dinner</i> , 2. Ditjen. Hortikultura akan kembali mengundang eselon teknis terkait untuk pembahasan <i>provisional agenda</i> sidang ASWGC. |
| 4. | Tanggal 2 Maret 2015, Pusat KLN | Rapat Panitia Workshop Dukungan Swasembada Pangan Melalui Forum Internasional KESR dan D8 | Pusat KLN Biro Umum dan Humas Ditjen PPHP | Perkembangan masing-masing bidang dalam kepanitiaan terkait persiapan Workshop. | 1. Updating narasumber, moderator, dan peserta 2. Persiapan logistik |
| 5. | Tanggal 3 Maret 2015 Kementerian Sekretariat | Persiapan pelaksanaan program pelatihan bidang | KPI Bappenas, KST Kementerian Luar Negeri, Ses Ditjen Perternakan, Pusat | 1. Koordinasi dan Diskusi mengenai persiapan pelaksanaan pelatihan Inseminasi Buatan yang direncanakan dilaksanakan bulan September 2015. 2. Berdiskusi mengenai balai yang akan menjadi | 1. Pusat KLN akan berkoordinasi dan diskusi lebih lanjut dengan instansi |

| | | | | | |
|----|---|--|--|---|---|
| | Negara | Inseminasi Buatan Tahun Anggaran 2015 | Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pertanian | <i>implementing agency</i> untuk pelatihan tersebut. | terkait, untuk menentukan balai yang akan melaksanakan pelatihan tersebut. 2. Kementerian Sekretariat Negara akan mengundang BBIB untuk melakukan presentasi 3 fase yang dirancang untuk pelatihan dimaksud. |
| 6. | Tanggal 3-6 Maret 2015, Hotel Alila Jakarta | <i>Strategic Planning Meeting</i> IMT-GT 2015 | 1. Kemenko Perekonomian 2. Kemlu 3. BKPM 4. Kemdag 5. Kempar 6. MUI 7. Kementan (Pusat KLN, Ditjen PPHP, Barantan, Ditjen PKH) 8. Perwakilan Daerah (Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Riau) | 1. Pertemuan terbagi kedalam beberapa bagian, yaitu: <i>a. Mid Term Review Implementation Blueprint 2012-2016</i> <i>b. Strategic Planning Meeting 2015</i> <i>c. Working Group Break-out Session</i> 2. Perubahan mekanisme pertemuan tahunan IMT-GT 3. Pembahasan SPM 2015 meliputi <i>Green Cities Initiative (GCI)</i> , <i>Special Border Economic Zone (SBEZ)</i> , Penang-Belawan-Trang RoRo Route, <i>statistical data base</i> , penguatan dialog IMT-GT dan kontribusi terhadap AEC, penguatan kapasitas pemangku kepentingan IMT-GT, MOU Kerjasama CIMT dan ADB, serta peluang kerjasama potensial di masa mendatang. 4. Pertemuan mendiskusikan beberapa proyek dibawah WGAAE yang masuk dalam IB 2012-2016 serta capaiannya hingga tahun 2014. Selain itu, pertemuan juga membahas mengenai rencana kegiatan proyek-proyek tersebut dalam Rolling Pipelines (RP) untuk periode 2015-2016. Matriks capaian dan rencana 2015-2016 proyek-proyek WGAAE sebagaimana terlampir. | 1. Pertemuan mengharapkan agar masing-masing WG menyerahkan project template/project profile untuk informasi dasar dan update bagi CIMT. Terkait hal ini, Pusat KLN akan segera menyiapkan surat tindak lanjut kepada <i>project proponent</i> (Prop. Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Ditjen PPHP) 2. Pusat KLN perlu segera melaksanakan rapat koordinasi |

| | | | | | |
|-----|---|--|---|--|--|
| | | | | <ol style="list-style-type: none"> 5. Pertemuan mencatat dua proyek baru yang diusulkan oleh Indonesia, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Farmers internship in Thailand</i> (usulan Prop. Bengkulu) b. <i>Farmers Market Development</i> (usulan Ditjen PPHP) 6. Pertemuan menyepakati agar pertemuan ini dibahas lebih lanjut pada Pertemuan WGAAE ke-8 tahun 2015. Indonesia diminta untuk menyerahkan proposal sesuai template yang telah ditetapkan oleh CIMT. | dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan WGAAE untuk mendapatkan pandangan, saran, dan masukan lebih lanjut. |
| 7.. | Tanggal 4 Maret 2015 Pusat Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pertanian | Rapat Persiapan Keikutsertaan dalam Pameran di Indonesia South-Sotuh Cooperation Forum 17 Maret 2015 | BBIB Singosari, Sesditjen Peternakan, Badan Litbang, BB Mektan, Puslatan BPPSDMP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Update persiapan dari instansi terkait, termasuk mengenai petugas yang akan hadir pada pameran dimaksud. 2. Pembahasan konsep design <i>booth</i> Kemtan, mengenai bahan-bahan yang diperlukan selama pameran. 3. Penyusunan rencana kerja, yaitu pembagian Tugas masing-masing instansi pada saat pameran dan forum berlangsung. | Pusat KLN akan berkoordinasi lebih lanjut dengan instansi yang sudah konfirmasi akan hadir pada pameran dimaksud.. |
| 8. | Tanggal 10-12 Maret 2015, Gedung PIA | Workshop Dukungan Swasembada Pangan Melalui Forum Internasional KESR dan D8 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemenko Perekonomian 2. Kemlu 3. KKP 4. Kemdag 5. SKPD Indonesia-GT 6. SKPD Indonesia-EAGA 7. Kemtan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Acara Workshop dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. 2. Pertemuan dihadiri oleh 85 peserta dari Kementerian/Lembaga tingkat pusat dan SKPD lingkup pertanian, kelautan dan perikanan wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, serta HKTI, KTNA 3. keberhasilan forum-forum internasional sepenuhnya bergantung kepada seberapa besar Indonesia dapat memanfaatkan kerjasama ini. 4. Acara Workshop ini juga diliput oleh beberapa media nasional seperti Metrotvnews, Republika, Harian Nasional, inilahcom, Antara, Info Publik, Berita Raya Online, Lampost, | Laporan ke Sekjen dan SKPD terkait |

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--|---|---|---|
| | | | | Indomedianews. | |
| 9. | Tanggal, 13 Maret 2015 | Rapat pembahasan Country Program Framework FAO dan KSS, di BBP2TP, Bogor | Kemlu, PSE, PusKita KKP, BKP, | Dari hasil pertemuan tersebut dapat disimpulkan: a. Perlu di buat Tim kecil untuk secara khusus mencermati dokumen tersebut dan memuat pertemuan awal untuk menentukan kerangka kerjasamanya sebelum dibahas pada pertemuan interkem yang lebih luas. b. Perjanjian ini hendaknya diarahkan agar sejalan dengan isi dari SIPP c. Perjanjian ini diharapkan dapat membuka peluang sebesar-besarnya bagi tenaga ahli dari Indonesia untuk ikut terlibat dalam kegiatan yang akan dilaksanakan hasil dari perjanjian ini. | Masing-masing instansi agar membahas secara internal di K/L masing-masing dan menyampaikan masukan/tanggapannya kepada Pusat KLN untuk dibahas lebih lanjut pada rapat berikutnya |
| 10. | Tanggal 16 Maret 2015 | Rapat persiapan Pameran Tim Kornas KSS dalam rangka KAA, Wisma Bakrie 2, Jakarta | Bappenas, Kemlu, Sekretariat KSST Indonesia, Setneg, Kementerian PU, BKKBN, KKP, Kemtan BBIB Singosari dan Pusat KLN) | Masing-masing K/L diharapkan menyampaikan materi yang diperlukan Tim Kornas KSST untuk pameran tersebut. Khusus Kemtan diminta menyiapkan: 1. Peralatan potong kuku sapi serta leaflet maupun poster terkait Inseminasi buatan. 2. <i>Hand Tractor</i> | BBIB Singosari dan Pusat KLN akan menindaklanjuti permintaan tersebut dan berkoordinasi dengan instansi terkait lingkup Kemtan. |
| 11. | Tanggal 17 Maret 2015 | <i>The 3rd Indonesia South-South Cooperation Forum (ISSC)</i> , Kementerian Luar Negeri | Tim Kornas KSST, seluruh K/L dan swasta terkait. | Ada tiga hal utama yang dibahas pada ISSC Forum ke- 3 ini yaitu: i. Evaluasi tentang kebijakan Indonesia tentang KSS, khususnya pembentukan Kelompok Koordinasi pada tingkat nasional. | Hasil Forum ini dapat menjadi acuan dan pertimbangan KSS bidang pertanian di masa mendatang. |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|--|--|---|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ii. Dinamika KSS di Indonesia saat ini, termasuk bagaimana penyesuaiannya dengan kebijakan pemerintah. iii. Forum ini juga membahas bagaimana membangun sinergi antara Pemri, mitra pembangunan, dan penerima manfaat sebagai kontribusi perkembangan KSS di Indonesia dan dunia. | |
| 12. | Tanggal 18 Maret 2015 | Rapat Pembahasan Cost and Benefit Analysis CAPSA | <ul style="list-style-type: none"> 1. Balitbang 2. Pusat KLN | <p>Tujuan Pertemuan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembahasan Analisis <i>Cost and Benefit CAPSA</i>; b. Pemanfaatan keanggotaan Indonesia pada Forum <i>Centre for Sustainable Agricultural Mechanization (CSAM)</i> tahun 2014 ; c. Keanggotaan Indonesia pada Forum kerjasama <i>International Treaty on Plant Genetic Resources (ITPGRFA)</i> tahun 2014; d. Permintaan tagihan/<i>invoice</i> kontribusi Pemri pada Organisasi internasional tahun 2015 <p>Sesba Litbang, memberikan arahan agar Kementan segera merespon surat Kemlu dengan beberapa poin penting, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Indonesia c.q. Kementan akan mempertahankan keberadaan CAPSA, karena terkait dengan fokus CAPSA terhadap <i>poverty alleviation</i>, diseminasi teknologi dan <i>extension services</i>; b. Indonesia sebagai tuan rumah CAPSA, akan menyediakan jasa support personnel di tahun 2016 seperti yang tercantum dalam HCA tahun 1981, sesuai standar biaya Indonesia dalam alokasi DIPA Badan Litbang; c. Terkait dengan usulan kenaikan pledge kontribusi Indonesia pada CAPSA, Balitbang memutuskan untuk tidak menyetujui usulan ini, karena jumlah pledge kontribusi Indonesia sudah lebih tinggi dari kontribusi | <p>Badan Litbang akan melaporkan kepada Kepala Badan Litbang Pertanian dan mendistribusikan hasil laporan pertemuan ini. Untuk kemudian dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan arahan selanjutnya.</p> |

| | | | | | |
|-----|--|---|-----------|--|---|
| | | | | negara lain. | |
| 13. | Tanggal 18-20 Maret 2015/ Yogyakarta | Koordinasi dan penjajakan <i>Workshop</i> AEC 2015 | Pusat KLN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan Perjalanan Dinas ini adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan penjajakan terkait persiapan <i>Workshop</i> Strategi Peningkatan Sumberdaya Pangan Pasca AEC 2015 <i>Challenge and Way Forward</i>; b. Menjaring informasi terkait kesiapan sektor pertanian Indonesia dalam rangka menghadapi <i>ASEAN Economic Community</i> (AEC) pada tahun 2015 mendatang, khususnya di DI Yogyakarta. 2. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah kami lakukan baik Kepala bidang PPHP dan Kepala Seksi Pemasaran Hasil dan Pembiayaan Pertanian maupun Ketua STPP mendukung pelaksanaan kegiatan <i>workshop</i> Strategi Peningkatan Sumberdaya Pangan Pasca AEC 2015 <i>Challenge and Way Forward</i>; 3. Secara umum, Dinas Pertanian dan Peternakan DI Yogyakarta telah mensosialisasikan mengenai kesiapan para pelaku usaha dan petani untuk menghadapi MEA 2015. 4. Hal-hal yang menjadi kendala diantaranya para petani belum siap menghadapi MEA 2015, kurangnya penyebaran informasi ke pelosok daerah, kurangnya dukungan pemerintah karena daerah pengembangan hortikultura dialihkan menjadi daerah penyangga industri, pelabuhan, dan bandara. Adapun kendala yang biasanya ditemui menjelang MEA 2015 adalah kelambanan dalam menyebarkan informasi dan mensosialisasikannya ke seluruh sektor. | Pusat KLN akan melakukan koordinasi lebih lanjut dan mengundang Dinas Pertanian DIY dalam <i>workshop</i> Strategi Peningkatan Sumberdaya Pangan Pasca AEC 2015 <i>Challenge and Way Forward</i> untuk hadir sebagai salah satu narasumber dan menyajikan peluang dan hambatan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Diharapkan hal ini kan menjadi masukan lebih lanjut bagi Kementan dalam menyusun posisi Indonesia dalam penetapan rencana strategis kerjasama ASEAN bidang pangan dan pertanian tahun |

| | | | | | |
|-----|--|--|---|---|--|
| | | | | | 2016-2025. |
| 14. | Tanggal 23-24 Maret 2015, Cipayung | Koordinasi Kerjasama Regional | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid Regional 2. Kasub Bidang ASEAN 3. Kasub Bidang Non ASEAN 4. Kasub Bidang Intra Kawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Kerjasama Regional perlu diperkuat lagi 2. Review kegiatan Bidang Regional selama Triwulan I tahun 2015 | - |
| 15. | Tanggal 24 Maret 2015, di Setneg | Rapat persiapan Pameran Tim Kornas KSS dalam rangka KAA | Bappenas, Kemlu, Sekretariat KSST Indonesia, Setneg, Kementerian PU, BKKBN, KKP, Kemtan BBIB Singosari dan Pusat KLN) | Masing-masing K/L diharapkan menyampaikan foto dan spesifikasi alat/mesin untuk persetujuan kepada pihak paspampres. | BBIB Singosari dan Pusat KLN akan menyampaikan melalui email kepada Sekretariat Kornas KSST. |
| 16. | Tanggal 24 Maret 2015, Ruang Rapat BPKP, Gedung Eks BP7, Kementerian Luar Negeri | Rapat Persiapan <i>The 38 Session of ICECS</i> (Sidang Komisi Ekonomi, Budaya, dan Sosial OKI ke-38) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemenlu 2. Kemen Pariwisata 3. Kementan 4. Kemenkeu 5. Kemenhub 6. Kemensos 7. Kemendikbud 8. Kemenkominfo 9. Kemenristek dan PT 10. Kemenag 11. Kementerian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sidang akan membahas draft Laporan SG OKI kepada Sidang Komisi dan Draft Resolusi. 2. Salah satu isi draft resolusi terkait sektor pertanian adalah seruan agar negara-negara yang terlibat proyek cotton development OKI agar segera menyampaikan <i>formal request</i> pendanaan kpd IDB. Terkait hal ini, dari segi detail substansi kerjasama, PKLN Kemtan menyampaikan tentang proyek Cotton Program OKI yang belum dijalankan di Indonesia adalah salah satu dari 19 proyek sejenis yang juga belum dijalankan oleh negara anggota lainnya, dari total 21 proyek yang telah mendapat persetujuan pendanaan IDB. | Perwakilan PKLN Kemtan meminta kepada Delri dari Kemlu yang akan hadir dalam Sidang untuk mencari informasi secara informal tentang pendanaan proyek cotton. Proyek mana saja yang akan digabungkan dan apakah bentuk pendanaan dari |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|--|---|--|
| | | | <p>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Wanita</p> <p>12. Kemenkes</p> <p>13. BKKBN</p> | <p>3. Dalam Draft Laporan SG dan Draf Resolusi juga termuat inisiatif <i>Islamic Organization for Food Security</i> (IOFS) prakarsa Kazakhstan. Posisi Indonesia terhadap IOFS masih tetap, yaitu tidak pada posisi untuk menantangani statuta karena belum dapat mengambil manfaat keanggotaan dan belum tepat saatnya juga untuk menjadi observer.</p> <p>4. Dalam menindaklanjuti proyek cotton, hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Pengusul proyek (peneliti dari Balittas Malang masih berminat melanjutkan proyek)</p> <p>b. Nilai proyek terlalu kecil (140.00 USD) jika dibandingkan dengan prosedurnya yang harus melalui Menteri Keuangan</p> <p>c. Dalam draft Laporan SG OKI pada Sidang Komisi ICECS ke-38 mendatang, 19 proyek Cotton OIC yang belum didanai ADB akan dimerger, perlu informasi apakah proyek usulan Indonesia termasuk yang akan dimerger.</p> | <p>IDB berupa grant atau loan. Jika grant, kemungkinan Indonesia akan melanjutkan, namun jika berupa loan, akan di drop.</p> |
| 17. | Tanggal 26-27 Maret 2015, Jawa Barat | Survey Persiapan APO TES Knowledge Management | <p>1. Pusat KLN</p> <p>2. BBPP Lembang</p> | <p>1. Kegiatan APO TES Knowledge Management akan dilaksanakan pada tanggal 4-6 Mei 2015, di BBPP Lembang</p> <p>2. Meninjau fasilitas yang ada di BBPP Lembang untuk fasilitasi pertemuan atau pelatihan internasional</p> | <p>Perlu surat resmi dari Pusat KLN untuk permohonan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di BBPP Lembang</p> |
| 18. | Tanggal 27 Maret 2015/ RR. Keswan | Rapat Persiapan 23 rd ASWGL | <p>1. Sesditjen. Peternakan dan Keswan</p> <p>2. BPPMSOH</p> <p>3. Pusat KLN</p> | <p>1. Tujuan Rapat adalah untuk mempersiapkan posisi DELRI pada pertemuan ke-23 ASWGL;</p> <p>2. Indonesia menjadi <i>Lead Country website</i> ASWGL;</p> | <p>National Focal Point ASWGL cq: Direktur Kesehatan Hewan akan bersurat ke ASEC untuk</p> |

| | | | | | |
|-----|----------------------------------|--|---|---|--|
| | | | | | meminta fasilitasi transfer pengelolaan website beserta password untuk Indonesia, serta moderator for ASEAN Animal Health Website bagi AMS lainnya yang akan diselenggarakan di Indonesia. |
| 19. | Tanggal 27 Maret 2015 di Bangkok | Rapat persiapan pertemuan IRCO tanggal 1-2 April 2015, Bangkok | Kemdag, Kemtan, Gapkindo, Dewan Karet, BPS, BAPPEBTI, Bursa Komoditi Derivatif, Kementerian Perindustrian | Menindaklanjuti hasil sidang ITRC ke -24 di Bandung, terkait pertanian diantaranya sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. ITRC akan mendorong adanya pertemuan tingkat Menteri untuk 7 negara ASEAN dalam rangka mendorong terbentuk ASEAN Rubber Council yang didalamnya tidak saja hanya terdiri dari Indonesia, Thailand dan Malaysia namun juga negara produsen karet lainnya di ASEAN. 2. Indonesia perlu mencermati dan menyampaikan komponen <i>Cost of Production (COP)</i>. Untuk itu Ditjen Perkebunan diminta untuk menyiapkan bahan terkait dengan hal tersebut untuk dibahas pada bulan akhir bulan Mei 2015. 3. Dalam rangka meningkatkan konsumsi domestik karet alam sebesar 10 % per tahun yang rencana akan dilaksanakan di Yogyakarta bulan Mei 2015 Indonesia perlu menyiapkan rencana konsumsi karet alamnya termasuk juga di sektor pertanian. | Pusat KLN akan melakukan rapat koordinasi dalam rangka membahas posisi Kemtan pada ITRC ke-25 sekaligus identifikasi konsumsi karet di sektor pertanian. |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|---|--|
| 20. | Tanggal 27 Maret 2015, Jakarta | Rapat Persiapan Sosialisasi PCM COMCEC OIC dan KSS | 1. Pusat KLN 2. Puslattan 3. Ditjen PKH | 1. Matriks tugas panitia 2. Bahan materi sosialisasi | Penyiapan materi dan logistik sosialisasi |
| III. KERJASAMA MULTILATERAL | | | | | |
| 1. | Tanggal 5 Maret 2015/ Pusat KLN Kemtan | Rapat kordinasi persiapan HPS ke-35 | Pusat KLN Kemtan, BKP Provinsi Sum- Sel, Direktorat Jenderal Perkebunan. | Berdasarkan arahan Bapak Sekretaris Jenderal, pelaksanaan HPS ke-35 tahun 2015 di Sumatera Selatan, sebagai berikut: 1. Agar didakan gerakan tanam padi yang dipersiapkan secara khusus tanpa ekspos ke khalayak umum 2. lokasi tanam padi jauh dari keramaian dan dekat Desa Mandiri Pangan. 3. Yang mengikuti tanam padi hanya presiden, menteri pertanian, gubernur dan duta besar. 4. Makan siang disiapkan oleh petani di lokasi tanam padi. 5. Agar ada penyerahan hand tractor dan aplikasinya oleh Presiden. 6. Bupati yang diundang hanya yang memiliki prestasi mengingat Bapak Presiden tidak menyukai jika semua pimpinan daerah berada pada satu kegiatan secara bersamaan. 7. Ditjen Perkebunan sudah membuat kerangka acuan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan HPS 2015 | 1. Kabadan BKP akan berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah terkait arahan Bapak Sekjen. 2. Akan dilaksanakan rapat koordinasi persiapan HPS ke-35 di Sumatera Selatan tanggal 13 -14 Maret 2015 |
| 2. | Tanggal 5 Maret 2015/ | Rapat Penyusunan | Asisten Deputi Urusan | 1. Telah dicanangkan <i>Globally Important Agriculture Heritage System (GIAHS)</i> sebagai "Inisiatif Kemitraan untuk | Rapat koordinasi GIAHS selanjutnya akan |

| | | | | | |
|----|---|--|---|--|---|
| | Badan Ketahanan Pangan | Pedum GIAHS | Pemberdayaan Masyarakat, Kedepatian VII, wakil Direktorat PPIH, Kementerian Luar Negeri, wakil Karo Perencanaan, Setjen, wakil dari Kapus KLN, Kemtan, wakil dari BKP | Keberlanjutan Pembangunan” Pemri telah memberikan perhatian khusus untuk mengembangkan model tersebut sejak tahun 2013. 2. Untuk mendukung sosialisasi dan pengembangan Aplikasi Model GIAHS tersebut, Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2015 mengalokasikan kegiatan GIAHS di tingkat pusat dan daerah, khususnya pada dua provinsi yaitu Jawa Barat dan Bali, terkait dengan Budaya Mengonsumsi Rasi (beras singkong) di Desa Cirendeu, Jawa Barat dan Budaya Tri Hita Kirana di Desa Bugbug, Karang asem, Bali. 3. BKP telah disusun draft Pedoman Umum Sosialisasi dan Implementasi GIAHS. | dilaksanakan di Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan tanggal 10 Maret 2015 |
| 3. | Tanggal 10 Maret 2015/ BPTP Jawa Barat? | Sosialisasi kebijakan program dan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim | Sesditjen Lingkup Kementan, SekBadan Lingkup Kementan, Setjen Kementan | Perubahan iklim merupakan tantangan paling serius yang dihadapi masyarakat dunia pada saat ini dan ke depan. Sejumlah bukti baru dan kuat yang muncul dari berbagai studi mutakhir memperlihatkan faktor antropogenik, terutama industrialisasi yang berkembang cepat selama 50 tahun terakhir, telah menyebabkan pemanasan global secara signifikan. Seiring dengan pemanasan global, terjadi pula perubahan iklim lainnya, seperti peningkatan frekuensi dan intensitas banjir dan kekeringan serta peningkatan periodisitas El-Nino. Walaupun berkontribusi relatif kecil (sekitar 7%) terhadap emisi GRK nasional, namun sektor pertanian, terutama subsektor tanaman pangan, mengalami dampak (victim) perubahan iklim yang cukup besar. Di sisi lain, sektor pertanian berperan penting dalam kehidupan dan perekonomian nasional, terutama sebagai penghasil utama bahan pangan, bahan baku industri dan bioenergi. Sektor | Rangkuman hasil Sosialisasi akan digunakan sebagai acuan untuk penanganan dampak perubahan iklim bagi sektor pertanian. |

| | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|
| | | | | <p>pertanian juga menghasilkan jasa lingkungan dan berbagai fungsi lainnya seperti penyedia lapangan kerja bagi sekitar 40% angkatan kerja Indonesia, penyumbang pertumbuhan ekonomi, menjaga ketahanan pangan, memberikan kesegaran dan keindahan di perdesaan (rural amenity), dan menjaga tata air daerah aliran sungai.</p> <p>Perubahan iklim dapat mempengaruhi sektor pertanian, baik sebagai penghasil barang yang dapat dipasarkan maupun sebagai penghasil berbagai jasa lingkungan. Oleh sebab itu, antisipasi dan adaptasi sektor pertanian terhadap perubahan iklim harus menjadi program utama dalam menghadapi perubahan iklim.</p> | |
| 4. | Tanggal 11 Maret 2015/ Kementerian Koordinastor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan? | Rapat kordinasi Kebijakan Model Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (GIAHS/NIAHS) | Wakil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kemenko PMK, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian(Pusat KLN, BKP), IPB, FAO Indonesia, BPPI, dan PNPM. | <p>Agenda Rapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Tim Koordinasi GIAHS/NIAHS 2. Pembahasan pedoman umum NIAHS 3. Pemaparan GEF Focal Point di Indonesia 4. Pembahasan proposal Tri Hita Karana di Bali <p>GIAHS, selaras dengan butir ke sembilan Nawa Cita Kabinet Kerja yakni memperteguh ke Bhineka-an serta memperkuat restorasi sosial Indonesia. Langkah itu ditempuh antara lain dengan, mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal. Meningkatkan proses pertukaran budaya untuk membangun kemajemukan sebagai kekuatan budaya.</p> <p>Proposal Pendanaan GEF untuk Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Pemberdayaan Masyarakat:</p> <p>Global Environment Facility Small Grants Programme (GEF</p> | Sebagai tindaklanjut, akan diadakan Finalisasi Penyusunan Pedoman GIAHS/NIAHS |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | <p>SGP) Indonesia adalah program pendanaan lingkungan yang didukung oleh GEF dan dilaksanakan oleh UNDP mewakili lembaga-lembaga pelaksana GEF lainnya termasuk Bank Dunia dan UNEP.</p> <p>Dana hibah yang diberikan berkisar 2,000 \$ – 50,000 \$ untuk masa pelaksanaan maksimal 24 bulan. Mohon diperhatikan untuk kontribusi masyarakat dalam perencanaan biaya, baik itu berupa jasa (natura) atau dana yang digerakkan oleh masyarakat agar memenuhi syarat dana dampingan GEF SGP dengan perbandingan 1:1. Dana dampingan atau kontribusi dari pengaju proposal ini dimaksudkan untuk menekankan kemandirian dan memberikan jaminan keberlanjutan program. Hanya lembaga yang memiliki kontribusi dan swadaya yang akan diberi nilai lebih dalam proses seleksi.</p> | |
| 5. | Tanggal 11 Maret 2015/ Bappenas | <p>Undangan Validation workshop UNPDF 2016 – 2020</p> <p>UN Partnership for Development Framework (UNPDF) adalah program Kemitraan PBB dalam kerangka Pembangunan yang</p> | <p>Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas, UN Resident Coordinator., Bappenas, Kemenko PMK, Kemenko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,</p> | <p>The UNPDF 2016-2020 akan dikembangkan pada tahun 2014, dan akan mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Selain tahap perencanaan, proses ini terdiri dari 4 fase:</p> <p>Proses roll-out penuh telah diuraikan di dalam UNPDF 2016-2020 roll-out Komprehensif Paket.</p> <p>Setidaknya 18 lembaga donor yang akan menjadi bagian dari UNPDF 2016-2020: FAO, ILO, IOM, UNAIDS, UNDP, UNEP, UNESCO, UNFPA, UN-HABITAT, UNHCR, UNICEF, UNIDO, UNOCHA, UNODC, UNOPS, UNWOMEN, WFP, WHO.</p> <p>Prinsip-prinsip panduan untuk rencana strategis 5 tahun baru:</p> | <p>Akan diadakan Workshop Country Programme Document (CPD) UNDP 2016-2020</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| | | <p>menekankan perubahan dari bantuan pembangunan ke kemitraan yang setara.</p> | <p>Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kemenkom Info, Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemenkum HAM, Kementerian Kehutanan, Kemendikbud, BKKBN, BNPB, Komisi penanggulangan</p> | <p>UNPDF perlu menyoroti kemitraan yang setara antara Pemerintah Indonesia dan PBB di Indonesia;</p> <p>RPJMN 2015-2019 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) sebagai pedoman dokumen. Timeline dari UNPDF roll-out akan mengikuti timeline dari RPJMN roll-out;</p> <p>UNPDF yang harus strategis, fleksibel dan lincah. Ini perlu fokus pada perspektif-tingkat yang lebih tinggi, tidak termasuk semua semua badan PBB lakukan;</p> <p>UNPDF perlu menyoroti nilai di mana PBB telah ditambahkan dan keunggulan komparatif;</p> <p>UNPDF yang akan menjadi kerangka kerja hasil-satunya (tidak ada output);</p> <p>The UNPDF roll-out harus menjadi proses yang terbuka dan inklusif;</p> <p>Roll-out harus ringan: tidak hanya berfokus pada perencanaan, tetapi berfokus pada implementasi.</p> | |
|--|--|--|---|---|--|

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|---|
| | | | AIDS, dan United Nations Country Team. | | |
| 6. | Tanggal 12 Maret 2015, Bappenas | Workshop Country Programme Document (CPD) UNDP 2016-2020 | UNDP, Bappenas, Kementan, Kemenlu, Kemenkeu, Kemendagri, Kemensetneg, Kemen LH, Kemenkes, Kemensos, KKP, Kemenhut, Kemen PU, Kemen ESDM, Kemen Desa PDT, Kemenkumham, BNPB, FAO | CPD merupakan rencana strategis kegiatan UNDP selama 5 tahun dalam mendukung pembangunan nasional di Indonesia. Dokumen ini mengacu pada UNDP's global Strategic Plan 2014-2017, UN Partnership Development Framework for Indonesia 2016-2020, dan RPJMN 2015-2019. Berdasarkan analisa UNDP, pembangunan nasional di Indonesia telah menuju ke arah yang benar dengan bukti: 1) menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-9 dari segi Purchasing Power Parity (PPP), 2) pertumbuhan ekonomi stabil rata-rata 5,7% pada 2006-2014, 3) termasuk 10 besar negara dengan peningkatan Human Development Index (HDI) terbesar, dan 4) Capaian target MDGs telah sesuai arah. Dari analisa tersebut, UNDP mengusulkan 4 outcome utama yang ingin dicapai pada kurun waktu 2015-2020, yaitu: 1) equitable access to social service, 2) equitable development and poverty reduction, 3) environmental sustainability and resilience to shocks, dan 4) improve governance and equitable access to justice for all. | Berdasarkan hasil diskusi, UNDP akan merevisi beberapa detail outcome sesuai dengan masukan-masukan dari peserta. |
| 7. | Tanggal 12 s/d 14 Maret 2015 / Palembang, Sumatera Selatan | Koordinasi dan Peninjauan Lokasi Kegiatan Hari Pangan Sedunia tahun 2015 | Telah dilaksanakan koordinasi di Kantor Gubernur Sumatera Selatan pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2015 pertemuan dipimpin oleh Asisten II Gubernur Sumatera Selatan yang dihadiri | <ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Sumatera Selatan akan menjadi tuan rumah peringatan HPS tahun 2015 2. Ruang lingkup kegiatan HPS (Pameran, Gelar teknologi, Diplomatik Tour, Acara Puncak, Perlombaan, Kunjungan Lapang dan acara-acar lainnya) 3. Lokasi Pembukaan Peringatan HPS direncanakan adalah Jakabaring Sport City 4. Lokasi yang dipersiapkan untuk dikunjungi RI I adalah Lokasi pengembangan kerbau rawa di Kecamatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Akan dilakukan koordinasi lanjutan untuk mempersiapkan HPS ke-35 tahun 2015 oleh Kementerian Pertanian dalam hal ini Ditjenbun sebagai |

| | | | | | |
|----|---|--|--|---|---|
| | | | <p>oleh Sekretaris Ditjen Perkebunan, wakil dari Pusat Kerja Sama Luar Negeri (Kabid Multilateral, Kasubid Administrasi dan Perencanaan, Kasub TU dan Atani, staf bidang Multilateral, dan Staf TU), wakil dari Sesditjen Perkebunan, wakil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (Puskita dan Biro Perencanaan), wakil dari Biro Hukum dan Informasi Publik, Setjen Kemtan, Pemda Sumatera Selatan.</p> | <p>Rambutan Kabupaten Banyuasin.</p> <p>5. Lokasi yang dipersiapkan untuk dikunjungi para Duta Besar pada kegiatan Diplomati Tour adalah Petani Penangkar bibit tanaman karet di Kec. Langka Kab. Sembawa dan UPTD BIB (Balai Inseminasi Buatan) di Kec. Semabawa Kab. Banyuasin</p> | <p>koordinasi pelaksanaan peringatan HPS tahun 2015, Setjen dan eselon satu teknis lainnya seKementerian Pertanian, Setjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Setjen Kementerian Kehutanan, dan Pemda Sum-Sel.</p> <p>2. Penyusunan SK Menteri Pertanian dan SK Gubernur Sumatera Selatan perihal kepanitiaan peringatan HPS tahun 2015.</p> |
| 8. | Jum'at s/d Sabtu, 13 s/d 14 Maret 2015/ Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi | Pembahasan Draft <i>Country Programming Framework</i> (CPF) dan Kerja Sama Selatan-Selatan dan <i>Triangular</i> | Kementerian Luar Negeri (Direktorat PPIH dan Direktorat Eko Sos Bud), Pusat KLN Kementerian LH dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan | - Dalam merancang CPF sebaiknya melihat kembali Program Nasional Jangka Menengah RPJM 2015-2019, dan <i>National medium Term Plan Framework</i> (NMTPF). RPJM adalah alat merencanakan dan mengembangkan program strategis, dirancang untuk membantu pemerintah Indonesia menentukan prioritas strategis dan memfasilitasi mobilisasi bantuan eksternal di sektor pertanian. <i>National medium Term Plan Framework</i> (NMTPF) merupakan | Peserta rapat sepakat untuk melakukan rapat lanjutan dengan Tim Kecil dalam merumuskan program-program prioritas kerja sama RI-FAO kedepan. |

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|--|
| | Pertanian - Bogor | (KSST) dalam Kerangka Kemitraan RI - FAO | Perikanan, Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Peternakan dan Keswan, BKP, PSE KP, Biro Hukum dan Informasi Publik, dan Dr. Hamim | <p><i>sebuah living document</i> yang dapat diperbaharui secara berkala dengan menyesuaikan aktivitas waktu kegiatan.</p> <p>- <i>New Partnership and Liaison Office</i> yang ditawarkan oleh FAO kepada Indonesia perlu dipandang positif oleh Pemri karena dapat membuka kesempatan untuk melakukan kerja sama dengan lebih baik, antara lain melalui pembentukan <i>Steering Committee (SC)</i>, sebagai wadah/pintu informasi yang dapat menampung dan mengawasi seluruh informasi mengenai kerjasama antara Indonesia-FAO. Hal ini didasarkan oleh kenyataan di lapangan bahwa terdapat banyak sekali perjanjian/kerjasama yang telah dilakukan oleh FAO dengan K/L di Indonesia, seperti perjanjian kerjasama dengan Kementerian PDT, IPB, BATAN, dan perjanjian lainnya dimana tidak semua K/L mengetahui informasi tersebut.</p> | |
| 9. | Tanggal 17 Maret 2015/ Double Tree Hilton Hotel Jakarta | Finalisasi pembahasan mekanisme penerimaan dan penyaluran dana hibah ICCTF | Kemkeu, Bappenas, K/L yang terkait Perubahan Iklim | ICCTF menangani perubahan iklim (land-based mitigation, energy, & resilience and adaptation) Selaku Dana Perwalian yang sudah memiliki dasar hukum (Kepmen Bappenas no. 44/2009, Perpres no. 80/2011 dan Permen Bappenas no. 3/2013), ICCTF berwenang untuk mengumpulkan dan menerima dana (baik dari dalam negeri maupun luar negeri), menyalurkan dana tersebut ke pihak-pihak terkait kegiatan penanganan perubahan iklim, dan wajib melaporkan penggunaan dananya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. ICCTF adalah sebuah Satuan Kerja (Satker) di dalam Bappenas □ jenis-jenis kegiatan dan pendanaan kegiatannya mengikuti peraturan Pemerintah. | <p>Pelaksana Kegiatan ICCTF:</p> <p>Kementerian sektor Pemerintah daerah NGO Universitas, dan Pihak swasta</p> |

| | | | | | |
|-----|--|--|---|--|---|
| 10. | Tanggal 18 Maret 2015, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Biogen, Bogor | Rapat persiapan workshop "Ruang Lingkup Prioritas Kerjasama Internasional Bidang Pertanian | Unit Eselon 1 Lingkup Kementerian Pertanian | <p>Terkait hasil diskusi mengenai persiapan workshop "Ruang Lingkup Prioritas Kerjasama Internasional Bidang Pertanian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Multilateral mewakili Kepala Pusat Kerja Sama Luar Negeri dengan nara sumber Prof. Tahlim Sudaryanto (PSEKP) dan Prof. Firdaus (IPB). Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh unit eselon I terkait lingkup Kementerian Pertanian. 2. Rapat bertujuan untuk: meminta arahan dan masukan dari kedua nara sumber dan peserta rapat terkait dengan rencana workshop Ruang Lingkup Prioritas Kerjasama Internasional Bidang Pertanian. <p>Usulan masing-masing unit eselon I supaya dilihat kembali yang prioritas, aspek-aspek yang merupakan isu baru yang muncul dan belum banyak, misalnya teknologi hemat sumber daya air dalam rangka keberlanjutan, intensifikasi yang berkelanjutan, bioekonomis (memanfaatkan resources), yang terkait dengan ketahanan pangan (isu yang dipandang bisa menjadi jembatan dari sisi produksi dengan pemanfaatan akses kualitas), perluasan areal (membangun residens), produksi pertanian (subyek gangguan eksternal)</p> | Akan diadakan Rapat lanjutan terkait persiapan workshop "Ruang Lingkup Prioritas Kerjasama Internasional Bidang Pertanian |
| 11. | Tanggal 18 -19 Maret 2015 di Pusdiklat Kementerian Sekretariat | <i>Workshop</i> penyusunan rencana kerja program <i>Emerging Pandemic Threats</i> kedua | Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pusat KLN, Dinas Peternakan, LSM, Peternak lokal FAO dan USAID | <p>Output dari kegiatan EPT-2 ini adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Sistem surveilans Zoonosis dan EID yang kompeten, termasuk diagnose Lab yang akurat dan cepat, yang digunakan disemua sector b) Terbentuknya program pencegahan dan pengendalian penyakit Zoonosis dan EID yang terpusat pada ONE | - Kegiatan EPT-2 tidak lepas dari rencana strategis dari Direktorat Kesehatan Hewan 2015 – 2019 yang mana kebijakan program Kesehatan |

| | | | | | |
|-----|--|---|---|--|---|
| | Negara | (EPT-2) pada tanggal 18 – 19 Maret 2015 sebagai tindak lanjut pada kegiatan <i>workshop</i> sebelumnya pada tanggal 27-28 Februari 2015 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara, Jl. Gaharu I No I, Cilandak Barat – Jakarta Selatan | | <p>HEALTH yang efektif dan berkesinambungan.</p> <p>c) Meningkatnya produktifitas peternakan untuk mengurangi persistensi dan menyebarnya penyakit dan meningkatkan ketahanan pangan</p> <p>d) Meningkatnya proses pemasaran untuk mengurangi penyebaran, persistensi, amplifikasi dan spillover patogen di sepanjang rantai nilai hewan dan produk hewan</p> <p>e) Terwujudnya peningkatan kapasitas kolaborasi One Health antara pemerintah dan institusi pendidikan</p> <p>f) Terbentuknya system kesiap-siagaan darurat dan respon untuk Zoonotic dan EID</p> <p>g) Terbentuknya <i>system monitoring</i> penyakit hewan prioritas dengan mekanisme untuk saling berbagi antar sector.</p> | <p>Hewan tidak hanya mendukung Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat dengan pendekatan penyakit (<i>animal diseases approach</i>) terkait dengan kesehatan Sapi dan Kerbau semata akan tetapi lebih luas lagi yaitu pendekatan kesehatan hewan secara menyeluruh (<i>animal health approach</i>)</p> <p>- Akan dilakukan workshop EPT-2 setelah berkoordinasi dengan instansi terkait..</p> |
| 12. | Kamis/ 19 Maret 2015/ R.R Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan | Persiapan kunjungan Associate Vice President IFAD ke Indonesia | BAPPENAS, Kemenkeu, Kementan, Kemenlu, Kementerian Kelautan dan Perikanan | Kementerian Pertanian dalam kegiatan kunjungan <i>Associate Vice President</i> IFAD ini telah melakukan persiapan antara lain pertemuan <i>bilateral meeting</i> akan dilaksanakan <i>dinner</i> antara Bapak Menteri Pertanian dengan Mr. John McIntyre tanggal 24 Maret 2015 jam 19.00 WIB di Hotel Mulia, Jakarta. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kunjungan lapang dalam rangka <i>closing ceremony</i> Proyek READ di Palu dan | Bahan untuk <i>bilateral meeting</i> untuk Bapak Menteri akan dipersiapkan oleh Pusat KLN sedangkan kegiatan kunjungan lapang ke Proyek READ di Kabupaten Parigi |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|
| | Multilateral, Kementerian Keuangan | | | Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah | Moutoung akan dipersiapkan oleh pelaksana proyek (BPPSDM Pertanian) |
| 13. | Tanggal 20 Maret 2015/ R.R Multilateral Kemlu | Koordinasi K/L pembahasan perumusan cetak biru peran Indonesia di G- 20 | Kemenko Perekonomian, BAPPENAS, Kemenkeu, Kemendag, Kemenaker, Kemen ESDM, Kementan, Kemenu, KPK dan Bank Indonesia | Upaya untuk memperkuat peran dalam kerja sama Global dan Regional dengan fokus pada penguatan diplomasi Indonesia dalam forum bilateral, multilateral, regional dan global melalui strategi ... (b). Perumusan <u>Cetak Biru peran Indonesia di G20</u> untuk memperjuangkan kerjasama yang berimbang dan relevan; | Mekanisme Monitoring dan Implementasi Penyusunan Cetak Biru G20 Indonesia 1. Koordinasi intensif dengan KL/Lembaga terkait 2. Kegiatan <i>Outreach: Focus Group Discussion</i> dengan akademisi, <i>think – tank, civil societies, experts</i> 3. Target penyelesaian: Awal Oktober 2015 |
| 14. | Tanggal 25-26 Maret 2015, Sulawesi Tengah | Mendampingi Kunjungan Lapangan Delegasi IFAD ke Sulawesi Tengah | Tim Delegasi IFAD: IFAD Associate Vice President, IFAD Country Programme Manager, IFAD Communication Division, IFAD Country Facilitator. Delegasi Indonesia: Wakil Gubernur | 1. Kepala BPPSDMP Kementan: keberhasilan suatu proyek PHLN tidak hanya diukur pada saat proyek itu selesai, tapi juga keberlanjutannya apakah setelah 3 tahun pasca proyek selesai petani yang telah ditingkatkan kapasitasnya melalui proyek ini masih melakukan kegiatan pertaniannya (on-farm dan off-farm) sebagaimana kegiatan pada saat proyek masih berjalan. 2. Secara umum, para delegasi terkesan dengan produktivitas kakao di Desa Sidole, Kab. Parigi Moutong, yang mencapai 2 ton/ha atau 3 kali lipat dari produktivitas | 1. Pusat KLN akan terus memantau perkembangan usulan kegiatan pinjaman luar negeri untuk scalling up proyek READ. 2. BPPSDMP akan mengirimkan widyaiswara komoditi |

| | | | | | |
|-----|--|---|--|---|--|
| | | | Sulteng, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kepala Pusat Kerja Sama Luar Negeri, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Asda 3 Prop. Sulteng, Kepala Bakorluh Prop. Sulteng, Wakil Bupati Parigi Moutong. | kakao nasional (0,6 ton/ha). Hasil ini tercapai berkat adanya kemitraan dengan swasta (Public Private Partnership/PPP) antara petani dengan PT. Mars. | kakao untuk belajar budidaya kakao dari Cocoa Village Center (CVC) dan Cocoa Development Center (CDC) binaan READ dan PT. Mars. |
| 15. | Tanggal 26-27 Maret 2015, Bandung Jawa Barat | Pembahasan Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Lapangan (on-site visit) Kegiatan PHLN Kementerian Pertanian TA. 2015 | Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan Perlengkapan, Ditjen. Tanaman Pangan, Ditjen. Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen. Hortikultura, Ditjen. Perkebunan, Ditjen. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian, BKP, BPPSDMP, Badan Karantina, Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa Eselon 1 (Ditjen. Hortikultura, BKP, Ditjen. Perkebunan, Ditjen. Tanaman Pangan) belum mempunyai template khusus untuk melakukan monev dalam rangka kegiatan PHLN. Hal ini dikarenakan, masing-masing proyek memiliki tipikal yang berbeda walaupun bersumber dari lembaga donor yang sama. 2. Pada pertemuan tersebut, dibuat template khusus untuk melaksanakan monev lapangan (on-site visit) kegiatan PHLN Kementerian Pertanian TA. 2015 dengan format yakni informasi dasar setiap proyek dan informasi yang akan didapat setelah melakukan monev. | PKLN akan membuat surat terkait permintaan informasi dasar kepada setiap eselon 1 yang memiliki proyek PHLN di lingkup Kementerian Pertanian TA. 2015. |

| | | | Informasi Perkarantinaan. | | |
|-----|---|--|---|---|---|
| 16. | Tanggal 27 Maret 2015 di Badan Ketahanan Pangan | Rapat Inisiatif <i>Zero Hunger Challenge</i> (ZHC) | Kementerian Luar Negeri, Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemenko Pengembangan Manusia dan Kebudayaan, Biro Perencanaan, Badan Litbang Pertanian, Ditjen Tanaman Pangan, BPPSMDP, Ditjen Perkebunan, BKP, Ditjen Hortikultura, Ditjen PSP, Ditjen PPHP, Ditjen Peternakan dan Keswan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan informasi awal terkait <i>Zero Hunger Challenge</i>. 2. Pembahasan mengenai tawaran FAO terkait <i>Zero Hunger Challenge</i>, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Indonesia sebenarnya telah memiliki beragam program yang relevan dengan target ZHC. Isu ketahanan pangan dan gizi dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan merupakan salah satu prioritas nasional di Indonesia. - Seandainya Indonesia menyatakan kesiapan untuk mendukung dan mengimplementasi ZHC di Indonesia, maka diperlukan inventarisasi kegiatan yang telah ada di Kementerian/Unit eselon I terkait. | Rapat lanjutan |
| 17. | Tanggal 31 Maret – 1 april 2015 di Wisma Pertanian Cipayung - Bogor | Finalisasi Penyusunan Pedoman GIAHS/NIAHS | Kepala Pusat Konsumsi Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian dengan nara sumber Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Masyarakat, | <ul style="list-style-type: none"> - finalisasi Pedoman Umum Sosialisasi dan Implementasi “Warisan Sistem Pertanian Yang Penting secara Global/Nasional (GIAHS/NIAHS) untuk Ketahanan Pangan. - Pedoman yang disusun oleh BKP merupakan pedoman teknis yang akan dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan NIAHS di Kementerian Pertanian dalam | - Finalisasi Pedoman akan dilaksanakan oleh Setba BKP berdasarkan pertemuan hari ini. |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|---|---|--|
| | | | <p>Kedepatian VII, Kemenko PMK dan Dr. Ageng S. Heryanto, dari kantor FAO Ref di Indonesia. Direktorat PPIH, Kemlu, Pusat KLN Kemtan, Kepala Bagian Perencanaan, Kepala Bidang dan perwakilan Pusat lingkup BKP, PusKita, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BKP provinsi Jawa Barat, dan Kementerian Kehutanan.</p> | <p>mensosialisasikan dan mengidentifikasi lokasi yang akan dijadikan NIAHS, yang dananya telah dialokasikan di tingkat Pusat dan Provinsi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masing-masing K/L akan membuat pedoman teknis yang disesuaikan dengan Pedoman Umum tentang NIAHS yang akan disusun oleh Kemenko PMK demikian halnya dengan Pedum yang disusun oleh BKP. - Kemenko PMK akan menyusun Tim Pokja yang akan menilai NIAHS yang akan diajukan K/L. | |
| IV. TATA USAHA DAN ATANI | | | | | |
| 1. | <p>Tanggal 24 Februari 2015, di Gedung PIA Lantai 1 Jl. Harsono RM 3, Ragunan</p> | <p>Rapat Sasaran Kerja Pegawai (SKP)</p> | <p>1. Biro Organisasi dan Kepegawaian 2. Seluruh pegawai Pusat KLN</p> | <p>Hal-hal yang dibahas antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menyusun Analisis Jabatan (anjab) sebagai pemetaan dari pekerjaan yang dikerjakan oleh setiap pegawai. 2. Setelah adanya pemetaan jabatan kita akan melakukan Analisis Beban Kerja (ABK) 3. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai | <p>Setelah Anjab dan ABK jadi maka dibuatlah SKP yang akan dikordnir dan dikumpulkan di Tata Usaha dan Atani Pusat KLN</p> |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|---|--|---|
| | Jakarta Selatan | | | <p>rancangan pelaksanaan Kegiatan Tugas Jabatan, sesuai dengan rincian tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur dan tata kerja organisasi.</p> <p>4. SKP disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan Kegiatan Tugas Jabatan, dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan organisasi, yang berisikan tentang apa kegiatan yang akan dilakukan, apa hasil yang akan dicapai, berapa yang akan dihasilkan dan kapan harus selesai.</p> | |
| 2. | Tanggal 16 – 17 Maret 2015, Bogor | Pertemuan Penyusunan dan Kebijakan Formasi ASN Tahun 2015, dan Optimalisasi e-Formasi Kementerian Pertanian Tahun 2015 | Acara dibuka dan sekaligus sebagai narasumber yaitu Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai dan Kepala Bagian Mutasi, Biro Organisasi dan Kepegawaian selain itu juga narasumber berasal dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yaitu Bapak Badi Mulyono dan Bapak Tito dari Kemenpan RB kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi yang dihadiri oleh wakil-wakil dari eselon I dan eselon II lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian pertanian. | <p>Hal-hal penting yang menjadi diskusi antara lain:</p> <p>A. Penyusunan Formasi Kementerian pertanian Tahun 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar hukum antara lain: 1.) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pedoman Analisis Jabatan, 2.) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Analisis Jabatan, 3) Program Reformasi Birokrasi Kementan. 2. Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut UU No.5 Tahun 2014 antara lain: 1.) Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2.) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 3. Jabatan Aparatur Sipil Negara menurut UU No.5 Tahun 2014 antara lain: 1.) Jabatan Pimpinan Tinggi, 2.) Jabatan Administrasi, 3.) Jabatan Fungsional | <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah anjab dan ABK terkumpul maka akan dikirimkan ke Kemenpan RB untuk formasi Kementan 2015 2. Aplikasi e-Formasi versi 2.1 akan terus di up date baik fitur dan isinya |

| | | | | | |
|----|------------------------------------|---|---|---|---|
| | | | | <p>B. Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara antara lain: 1.) Netralitas (profesional tdk memihak), 2.) kompetensi yg diperlukan sesuai dgn bidang tugas, 3.) Jaminan perlindungan hukum dlm melaksanakan tugas, 4) Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, 5.) Mempertanggung jawabkan tindakan kinerja kepada publik, 6.) Memiliki kemampuan dlm melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, 7.) Kesejahteraan</p> <p>Mekanisme Usulan Formasi CPNS Melalui Aplikasi e-Formasi yaitu;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Amanat UU ASN No.5/2014 pasal 127 yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk menjamin efisiensi, efektivitas dan akurasi pengambilan keputusan Diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi. 2. Keuntungan menggunakan Aplikasi e-Formasi yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Akurat b. Data yang berkualitas c. Berbagi data antar pemangku kepentingan d. Cepat pengambilan keputusan e. Akuntabel | |
| 3. | Tanggal, 19 – 20 Maret 2015, Bogor | Rapat pembahasan Renstra Setjen 2015-2019 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Perencanaan 2. Wakil-wakil dari eselon II lingkup Setjen | <p>Hal-hal penting yang menjadi diskusi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi Setjen untuk Renstra Setjen 2015-2019 masih menjadi bahan diskusi oleh para peserta rapat yang semula tertulis "Menjadi lembaga manajemen dan pelayanan teknis pembangunan pertanian-bioindustri yang maju | <p>Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan <i>output</i> (keluaran) dari eselon II sedangkan Indikator Kinerja Program (IKP)</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>dan berkualitas” agar disesuaikan dengan Program Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan tupoksi Setjen. Sedangkan untuk Misi Setjen belum dibahas namun dalam diskusi telah disepakati untuk Visi dan Misi Setjen 2015-2015 sebagai pengejawantahan dari Program Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo.</p> <p>2. Masing-masing Biro dan Pusat lingkup Setjen memberikan masukan terkait Indikator Kinerja Kegiatan (IKK yang dulu bernama IKU (Indikator Kinerja Utama)) pada Draft Renstra Setjen 2015-2019. Seperti halnya Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk Indikator Kinerja Keegiatannya yakni: 1.) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan 2.) Nilai Reformasi Birokrasi Kementan. Biro Keuangan dan Perlengkapan untuk Indikator Kinerja Keegiatannya yakni Opini Laporan Keuangan Kementan. Pusdatin, Biro Umum dan Humas, Biro Hukum dan Informasi Publik/PPID dan PVTTP untuk Indikator Kinerja Keegiatannya yakni Nilai Kualitas Pelayanan Publik Kementan melalui Indeks Kepuasan Konsumen (IKM). Dan untuk Pusat Kerja Sama Luar Negeri untuk Indikator Kinerja Keegiatannya yakni Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Luar Negeri. Untuk besaran nilai setiap indikator diharapkan minimal 75 (baik) dan semakin bertambah naik setiap tahunnya.</p> | <p>merupakan <i>outcome</i> (capaian) dari eselon I. Dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) merupakan <i>benefit</i> (keuntungan) dari Kementerian yang merupakan gabungan dari <i>output</i> ditambah <i>outcome</i> yang pada akhirnya akan menimbulkan <i>impact</i> (dampak) kepada pemerintah (presiden).</p> |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|---|
| 4. | Tanggal 20 Maret 2015 di Ruang Rapat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA), Bogor. | Rapat Finalisasi Laporan Tahunan 2014 dan Persiapan Evaluasi AKIP Sekretariat Jenderal dan Biro/Pusat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Pelaporan, Biro Perencanaan 2. Perwakilan unit eselon II lingkup Sekretariat Jenderal. | <p>Hal-hal yang dibahas antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arahan Kepala Bagian Pelaporan <ul style="list-style-type: none"> - Finalisasi Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal seharusnya pada bulan Februari, namun karena ada penyelesaian Laporan Kinerja pada bulan tersebut maka penyelesaian Laporan Tahunan agak mundur jadwalnya. - Perlu dipikirkan untuk strategi kedepan dalam penyelesaian berbagai laporan agar jadwalnya tidak tumpang tindih. 2. Beda dalam laporan tahunan dan laporan Kinerja adalah <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Tahunan adalah merupakan gambaran dari pelaksanaan kegiatan/program yang berdasarkan Pedoman Operasional Kegiatan dan kegiatan-kegiatan lain yang dianggap penting. - Laporan Kinerja adalah berdasarkan Perjanjian Kinerja beserta dengan anggaran dan realisasinya. 3. Untuk Laporan Tahunan output yang ada di Pusat Kerjasama Luar Negeri sudah merupakan kombinasi dari perjanjian kinerja dan Pedoman Operasional Kegiatan. 4. Pusat KLN menyatakan Laporan Kinerja sudah jelas formatnya, kalau laporan Tahunan masih mencari format, maka sebaiknya disusun berdasarkan kegiatan yang ada di POK beserta anggarannya, | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Laporan sebaiknya ada Tim dan di SK kan, sehingga nantinya orang yang datang dalam menghadiri rapat tidak berganti ganti. 2. Perlu keseragaman dalam menjawab pertanyaan auditor dimana Audit Satker akan dilaksanakan pada bulan April 2015 agar nilainya tidak turun perlu kejujuran dan komunikatif dalam menjawab. |
|----|--|---|--|--|---|

| | | | | | |
|----|---|--|---|--|--|
| | | | | namun di Bab awal juga diceritakan kegiatan yang tidak ada di POK dan disusun lebih runtut dan tidak kaku. | |
| 5. | Tanggal, 23 Maret 2015, Puslit Perkebunan Bogor | Rapat penataan organisasi eselon I, II, III dan IV lingkup Kementerian Pertanian | Perwakilan dari unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masing – masing unit eselon I menyampaikan pemaparan mengenai rencana struktur organisasi baru apabila struktur organisasi Ditjen. PPHP dihilangkan. 2. Kementerian PAN belum mempunyai peraturan baku mengenai struktur organisasi di suatu Kementerian/Lembaga sehingga usulan struktur organisasi di masing-masing unit eselon I kurang seragam terutama tupoksi yang menyangkup pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. 3. Ditjen. PPHP dirasakan masih kurang menginformasikan uraian tupoksi-nya sehingga unit eselon I masih kurang memahami tugas, pekerjaan dan kegiatan yang menjadi tugas dan peran Ditjen. PPHP selama ini. 4. Arahan Sekjen yang disampaikan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian bahwa Sekretariat Jenderal tidak menangani masalah teknis hanya manajemen saja sehingga usulan Pusat KLN yang akan menambah struktur Bagian Komoditi akan dibicarakan lagi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih perlu pembahasan lebih lanjut mengenai struktur dan nomenklatur Eselon II, III dan IV di masing-masing unit eselon I. 2. Biro OK perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan Ditjen. PPHP. |
| 6. | Tanggal 23 – 26 Maret 2015 di Gedung Pusat | Kursus Bahasa Inggris | Pegawai lingkup Pusat KLN | Kursus bahasa Inggris terbagi 2 kelas dengan jumlah peserta terdaftar kelas TOEFL sebanyak 28 orang peserta dengan guru dari LBPP LIA dan kelas General English sebanyak 21 orang peserta | Kursus berlangsung dari bulan Maret – Juni 2015 |

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|---|
| | Informasi dan Agribisnis | | | dengan guru dari ILP (<i>International Language Program</i>). Kelas TOEFL waktu belajarnya hari Senin dan Rabu mulai pukul 8.00 – 12.00 WIB sedangkan kelas General English waktu belajarnya hari Selasa dan Kamis mulai pukul 8.00 – 12.00 WIB | |
| 7. | Senin, 2 – 31 Maret 2015 di Pusat KLN – Kementerian Pertanian. | Penugasan pejabat/pegawai Kementerian Pertanian ke luar negeri. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Negara RI 2. Kementerian Luar Negeri 3. Kedutaan Besar Negara terkait. 4. Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. | Telah diproses penugasan pejabat /pegawai Kementan ke luar negeri sebanyak 73 orang yaitu mengikuti Workshop/seminar sebanyak 11 orang, menghadiri pertemuan/sidang sebanyak 29 orang, mengikuti pelatihan/training sebanyak 25 orang, program S2 sebanyak 1 orang, program S3 sebanyak 3 orang, Post Doctoral sebanyak 3 orang, Tenaga Ahli sebanyak 2 orang. | Berkas /dokumen perjalanan pejabat /pegawai ybs telah dikirim ke Sekretariat Negara RI untuk memperoleh surat persetujuan Setneg RI dan ke Kementerian Luar Negeri untuk memperoleh exit – permit serta Kedutaan Besar terkait untuk memperoleh visa. |